

newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 146, September 2021



Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip	2
Kepala Staf Umum TNI Berikan Ceramah Kepada Peserta PPSA 23.....	3
Penataran Istri/Suami PPRA 62.....	4
Pembekalan Gubernur Lemhannas RI kepada Peserta Pelatihan untuk Pelatih.....	5
Agus Widjojo: Teknologi Pertahanan Harus Jadi Bagian dari Teknologi Nasional.....	6
Audiensi Lemhannas RI dengan Mahasiswa Untag Semarang.....	6
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Beri Ceramah dalam Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 62	7
Ceramah Deputi Rehabilitasi BNN Kepada Peserta Penataran Istri/Suami peserta PPRA 62	8
Penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62	9
RTD "Optimalisasi Peran Media Sosial Guna Mengembangkan Wawasan Kebangsaan"	10
RDP Lemhannas RI dengan Komisi I DPR RI.....	11
Pertemuan Rutin Perista Lemhannas RI.....	12

Penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62

Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip

Kamis, 19 Agustus 2021



Lemhannas RI mengadakan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengangkat tema "Jadwal Retensi Arsip (JRA)", pada Kamis (19/8) secara daring.

Hadir sebagai narasumber adalah Arsiparis Ahli Madya Direktorat Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Dra. Dwi Mudalsih, M.Hum. sebagai narasumber dan bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kearsipan (Jadwal Retensi Kearsipan) secara umum serta.

Lemhannas RI pada tahun 2009 telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Lemhannas RI. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan serta merupakan upaya mewujudkan tertib administrasi di

lingkungan Lemhannas RI khususnya yang berkaitan dengan kearsipan.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Rokermakum Settama Lemhannas RI Sulis Marwiyani Fatkhan, S.H., M.Sc. mewakili Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum saat membuka sosialisasi tersebut mengatakan bahwa arsip merupakan simpul pemersatu bangsa, roh sebuah organisasi, dan bukti otentik dari sebuah rekaman kegiatan yang tidak terpisahkan.

Lebih lanjut Sulis Marwiyani menyatakan bahwa melalui sebuah arsip dapat diketahui sejauh mana dan bagaimana suatu hal terjadi, yang kemudian setelah diketahui proses dan perjalanannya maka suatu hal tersebut dapat dipahami dan dimaknai. Ia juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dwi Mudalsih selaku narasumber mengatakan bahwa dalam konteks penerapan Jadwal Retensi Arsip ada beberapa hal yang perlu menjadi panduan dalam hal penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

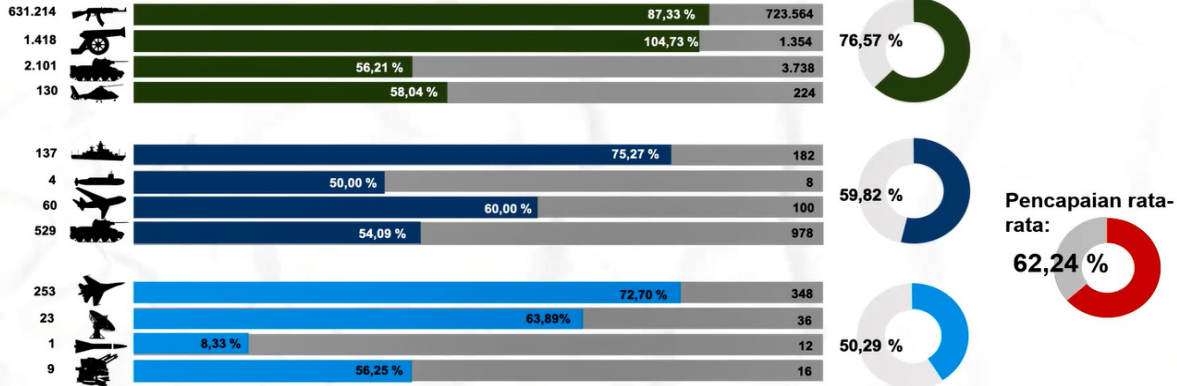
Pada kesempatan tersebut Dwi Mudalsih juga menjelaskan arsip dinamis, yaitu arsip yang digunakan secara langsung pada kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dinamis meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. "Undang-undang mengamanatkan bahwa ini (arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif) wajib dilaksanakan oleh pencipta arsip" pungkasnya.

Kamis, 19 Agustus 2021

"Minimum Essential Force (MEF)"
– Permenhan No. 39 Tahun 2015



s.d. 28 Mei 2021



Catatan:

- Pencapaian rata-rata MEF pada Renstra II (2015-2019): 62,24%
- Pengadaan Alutsista pada Renstra III (2020-2024) masih dalam proses kontrak

11

Kepala Staf Umum TNI Berikan Ceramah Kepada Peserta PPSA 23

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Eko Margiyono, M.A. mewakili Panglima TNI memberikan ceramah dengan tema "Kebijakan Strategi Penggunaan Kekuatan TNI di Era Tatanan Peradaban Baru" kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Lemhannas RI, pada Kamis (19/8) secara daring.

Pada kesempatan tersebut, Eko menjelaskan tentang dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tatanan global, regional, dan nasional. Menurut Eko, dinamika perkembangan lingkungan strategis secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pertahanan dan keamanan Indonesia. Perkembangan lingkungan strategis di Indonesia memiliki beberapa dinamika tersendiri di antaranya intoleransi dan radikalisme

yang semakin mencuat, situasi politik dalam negeri yang dinamis, penanganan Covid-19, defisit anggaran negara, dan gerakan separatis.

Dalam paparannya, Eko juga menyampaikan tugas pokok TNI menurut Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI dilakukan dengan cara Operasi Militer Perang (OMP) atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP). "TNI itu adalah alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," ujarnya.

Eko juga menjelaskan tentang *Minimum Essential Force* (MEF) berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 39 Tahun 2015. Dalam Permenhan disebutkan bahwa MEF dirumuskan ke dalam dua Rencana Strategis (Renstra), yakni tahun 2015-2019 dan tahun 2020-2024. Pencapaian MEF sampai akhir Renstra II tahun 2015-2019 adalah 62,24% sedangkan pada Renstra III tahun 2020-2024 masih dalam proses.

Ada beberapa upaya untuk memenuhi MEF TNI, yaitu peningkatan anggaran untuk pengadaan serta pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista, pemenuhan kebutuhan suku cadang alutsista, peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia serta peningkatan sarana prasarana pendukung alutsista, pemangkasan jalur birokrasi dalam proses pengadaan alutsista, dan peningkatan jumlah pengadaan alutsista TNI.

Penataran Istri/Suami PPRA 62

Senin, 23 Agustus 2021

Lemhannas RI menyelenggarakan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 62 Lemhannas RI Tahun 2021 secara daring. Penataran tersebut dilaksanakan selama enam hari dimulai Senin, 23 Agustus 2021 sampai dengan Senin, 30 Agustus 2021 dan diikuti oleh 76 orang istri/suami peserta, yang terdiri dari 71 orang istri dan 5 orang suami.

Penataran tersebut bertujuan untuk membekali dan memantapkan para istri/suami dalam peranannya sebagai pendamping kader pimpinan tingkat nasional, meningkatkan wawasan tentang etika bagi istri/suami yang dapat menjadi teladan bagi keluarga besar unit kerja dan masyarakat, dan meningkatkan keakraban dan persaudaraan antar sesama istri/suami peserta PPRA 62 maupun dengan Lemhannas RI.

"Keberhasilan para peserta Lemhannas RI dalam meniti karier dan mengemban tugas negara, tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran istri/suami selaku pendamping," kata Gubernur

Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo dalam Upacara Pembukaan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 62 Lemhannas RI. Oleh karena itu, Agus Widjojo menyampaikan bahwa sudah sepatutnya keharmonisan suami dan istri terus dijaga melalui pemeliharaan dan penyesuaian wawasan, moral dan etika.

Lebih lanjut Agus Widjojo menyampaikan bahwa semangat kebangsaan, iklim kekeluargaan yang penuh toleransi, dan kebersamaan dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika dapat saja mengalami erosi akibat arus globalisasi dan dinamika situasi politik yang berkembang. Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dengan lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi akar kerakyatan perlu semakin dikukuhkan.

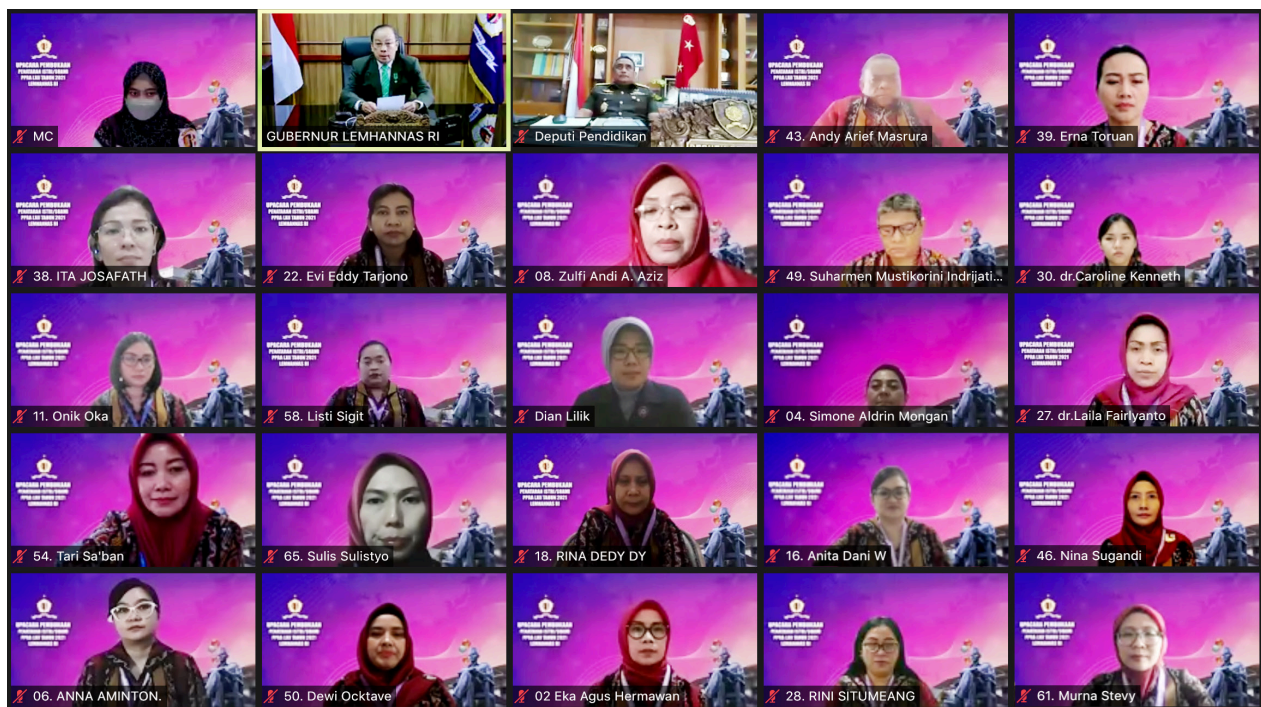
Agus Widjojo berharap melalui penataran ini hendaknya para peserta penataran dapat memahami makna moral dan etika kebangsaan yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam pola pikir, pola sikap, dan

pola tindak dalam kehidupan sehari-hari. "Hakikat penataran ini adalah menyiapkan para istri/suami, agar lebih memantapkan peranan dalam membantu dan mendampingi suami/istri, baik dalam hubungan kedinasan maupun dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat," pungkasnya.



Keberhasilan para peserta Lemhannas RI dalam meniti karier dan mengemban tugas negara, tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran istri/suami selaku pendamping."

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI





Senin, 23 Agustus 2021

Pembekalan Gubernur Lemhannas RI kepada Peserta Pelatihan untuk Pelatih

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan pembekalan kepada peserta Pelatihan Untuk Pelatih (PUP) Serta Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Dosen, Guru, dan Widyaiswara Angkatan II Tahun 2021 Lemhannas RI, pada Senin (23/8) secara daring.

Pada kesempatan tersebut Agus Widjojo menyampaikan bahwa fungsi pelatih atau trainers adalah sebagai pelaksana pembentukan agen perubahan dari implementasi nilai-nilai kebangsaan. "Tujuan akhir dari hal yang ingin dicapai setelah mengikuti pelatihan ini adalah tentang sikap dan perilaku yang ada pada peserta apabila telah selesai mengikuti pembekalan ini," ujar Agus membuka paparannya.

Agus Widjojo memaparkan tentang makna Ketahanan Nasional, yang merupakan kemampuan sebuah entitas untuk mengantisipasi, mempersiapkan diri dan merespon reaksi serta menyesuaikan terhadap perubahan gradual atau disrupsi dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup pada tingkat kesejahteraannya.

"Ketahanan Nasional itu sudah otomatis berarti ketahanan terhadap landasan ideologi negara, Pancasila," jelasnya.

Menurut Agus Widjojo, *core* Lemhannas bukan hanya ketahanan saja tetapi konsensus dasar kebangsaan meliputi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan implementasi pelaksanaan yang didasarkan kepada paradigma nasional meliputi wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional.

Ketahanan nasional dapat dibangun melalui pendekatan pancagatra, yakni gatra ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kondisi tiap gatra akan mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Jika seluruh gatra dalam kondisi baik, maka ketahanan nasional dapat dikatakan dalam kondisi baik. Sebaliknya, jika ketahanan gatra dalam kondisi lemah maka akan mempengaruhi ketahanan nasional secara keseluruhan. Agus Widjojo juga menjelaskan bahwa dalam membangun tiap-tiap gatra tersebut, dibutuhkan disiplin ilmu masing-masing gatra.

Agus Widjojo juga menyampaikan kondisi ketahanan nasional juga dapat dibangun melalui pendekatan spasial geografis, yakni kondisi ketahanan tiap-tiap provinsi. Kondisi ketahanan nasional dapat dikatakan baik jika keadaan kondisi seluruh provinsi dalam keadaan baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa saat membangun ketahanan provinsi dibutuhkan pendekatan gatra.



Ketahanan nasional dapat dibangun melalui pendekatan pancagatra, yakni gatra ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kondisi tiap gatra akan mempengaruhi kondisi ketahanan nasional."

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Agus Widjojo: Teknologi Pertahanan Harus Jadi Bagian dari Teknologi Nasional

Kamis, 12 Agustus 2021

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi salah satu narasumber dalam Forum Dialog Nusantara yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Habibie – Ainun yang mengangkat tema Pembangunan Industri dan Teknologi Pertahanan Nasional, pada Kamis (12/8) secara daring.

Menurut Agus Widjojo, Teknologi Pertahanan harus merupakan bagian rincian turunan dari Teknologi Nasional. Teknologi Nasional mempunyai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dalam seluruh fungsi dimensi nasional dan segala sesuatu yang bersifat untuk Teknologi Pertahanan berawal dari bidang nasional. "Namun, Teknologi Pertahanan Nasional itu tidak sepenuhnya meliputi cakupan Teknologi Nasional," jelasnya.

Kemudian, menurut Agus Widjojo, Industri Pertahanan Nasional merupakan salah satu pilar dan salah satu bangunan

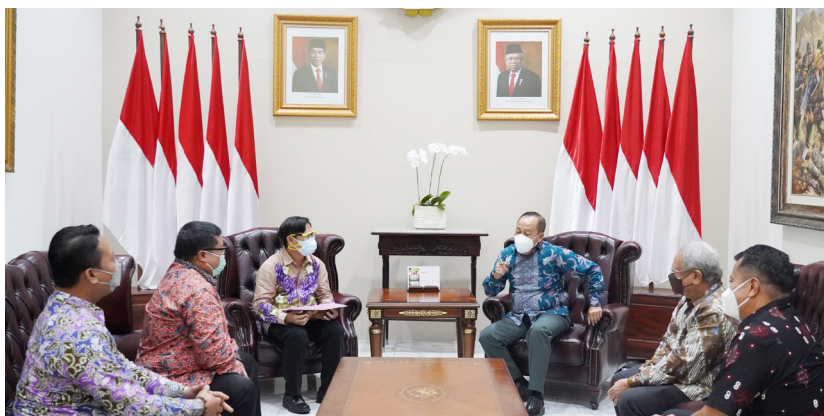


utama bagi daya saing ekonomi nasional. Aspek tingkat nasional tersebut mencakup pada saat masa damai dan masa perang, sedangkan pertahanan hanya berfokus pada masa perang.

Oleh karena itu, sebelum terjadi perang, Agus Widjojo berpendapat bahwa industri dan teknologi harus menjadi kompetitif serta produktif pada saat masa

damai.

Forum Dialog Nusantara tersebut dibuka oleh Ketua Dewan Penasihat Forum Dialog Nusantara Dr. Ing. Ilham Habibie, MBA. Dan turut hadir pula Wakil Ketua Komisi I DPR RI Drs. Utut Adianto, dan Pengamat Pertahanan Edy Prasetyono Ph.D. Sebagai narasumber.



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didampingi Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si., dan Tenaga Profesional Bidang SKA dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. menerima audiensi tiga mahasiswa Program Doktoral Program Studi Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang pada (3/9) di Ruang Tamu Pimpinan.

Tiga mahasiswa yang merupakan panitia Webinar Internasional Universitas

17 Agustus 1945 Semarang, yakni Ketua Panitia Pelaksana Webinar dr. Laurensius Lungan, MH, Sekretaris Webinar David Maharya Ardyantara, ST, MH., dan Bendahara Webinar Ontran Sumantri Riyanto, SH, MH., menjelaskan mengenai Webinar Internasional yang akan diselenggarakan dan meminta kesediaan Gubernur Lemhannas RI menjadi salah satu narasumber.

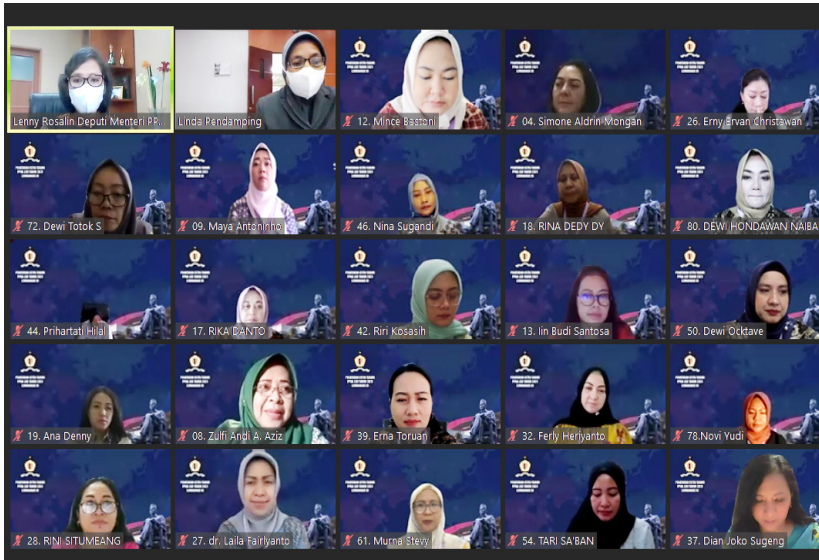
Webinar tersebut mengangkat tema "Towards A New Era in The Legal Order" dan diselenggarakan secara virtual. Latar belakang pemilihan tema tersebut karena

Audiensi Lemhannas RI dengan Mahasiswa Untag Semarang

Jum'at, 3 September 2021

dalam rangka menyiapkan tatanan hukum baru pasca pandemi diperlukan pembangunan generasi muda insan akademik dalam perspektif masa depan, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa dalam menghadapi era baru.

Dalam konteks tersebut, penyelenggara Webinar Internasional merasa pembangunan generasi muda itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas, termasuk dimensi hukum.



Rabu, 25 Agustus 2021

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Beri Ceramah dalam Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 62

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N. Rosalin, S.E., M.Sc., M.Fin. mewakili Menteri PPPA memberikan ceramah yang bertema tema "Peranan Perempuan dalam Pembangunan Nasional", kepada para peserta Penataran Istri/Suami peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Lemhannas RI pada Rabu (25/8) secara daring.

Memulai paparannya, Lenny menyebutkan bahwa 54% dari 131 juta penduduk perempuan di Indonesia berada di usia produktif dan harus diperhatikan agar bisa menjadi potensi bangsa yang positif serta bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Ia juga menjelaskan bahwa peran perempuan harus ditingkatkan karena fakta di lapangan masih banyak terjadi diskriminasi gender. Diskriminasi gender kerap terjadi pada lingkungan individu, keluarga, dan masyarakat publik.

Ada empat hal kategori yang kerap terjadi yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotype, dan beban ganda. "Kata-

”
Seluruh pihak dapat memotivasi diri menjadi teladan dan agen perubahan bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.”

Lenny N. Rosalin, S.E., M.Sc., M.Fin.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

kata diskriminasi gender di sini tidak pernah terungkap dan tidak pernah dijelaskan secara publik tetapi kita bisa merasakannya,” ujar Lenny.

Lebih lanjut, Lenny juga mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diukur dari tiga variabel pembentuk utama. Variabel tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga variabel

tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur variabel kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur variabel hidup layak digunakan indikator Gross National Income (GNI) per kapita.

Lenny juga memaparkan mengenai Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Saat ini telah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan, namun menurutnya dari aspek kualitas, masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki. "Seluruh pihak dapat memotivasi diri menjadi teladan dan agen perubahan bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar", harap Lenny.

Ceramah Deputi Rehabilitasi BNN Kepada Peserta Penataran Istri/Suami peserta PPRA 62



Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, P.h.D. mewakili Kepala Badan Narkotika Nasional memberikan ceramah pada Penataran Istri/Suami peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Lemhannas RI, Kamis (26/8) secara daring.

Pada awal paparannya yang bertema “Penanggulangan Narkotika di



Kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia.”

Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, P.h.D.
Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional

Masa Pandemi Menuju Indonesia Bersih Narkotika (Bersinar)”, Riza menjelaskan tentang kejahatan narkotika yang merupakan salah satu jenis kejahatan luar biasa dan kejahatan terorganisir lintas negara/internasional sehingga dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak kehidupan suatu bangsa. “Kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia,” ucapnya.

Riza juga mengatakan bahwa ancaman dari narkotika di Indonesia meliputi beberapa hal, salah satunya adalah daya rusak. Daya rusak akibat dari narkotika lebih serius dibanding korupsi dan terorisme karena dapat merusak otak dan tidak ada jaminan sembuh. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ditemukan 83 jenis narkotika baru, salah satunya adalah *New Psychoactive Substances* (NPS).

Kondisi geografi di Indonesia yang terletak di antara dua benua dengan ±17.499 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000km mengakibatkan lemahnya pengawasan di wilayah laut, udara, dan perbatasan. Penyelundupan narkotika biasanya menggunakan modus disamarkan dalam kemasan makanan,

melalui jasa pengiriman paket, hingga masuk melalui pelabuhan kecil dengan kapal laut.

Riza juga menjelaskan bahwa BNN telah membuat kebijakan dan strategi dalam rangka melakukan penanggulangan kejahatan narkotika, salah satunya ialah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang terdiri dari langkah Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi. Pertama, Pencegahan dengan membangun sistem pencegahan dan membangun kemampuan masyarakat dalam menjaga dan melindungi setiap individu dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kedua, Pemberantasan yakni memperkuat hubungan kerja sama baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk mencegah masuknya narkotika dari luar negeri ke NKRI sehingga tidak beredar di masyarakat. Ketiga, Rehabilitasi yakni membangun sistem rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkotika yang komprehensif serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan penyalahguna dan pecandu narkotika.

Penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62



Selasa, 31 Agustus 2021

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 resmi ditutup pada Selasa (31/8) di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI. Sebanyak 80 orang peserta PPRA 62 dinyatakan lulus. Selama tujuh bulan masa pendidikan, seluruh tahapan berjalan dengan lancar, walaupun terdapat keterbatasan karena tidak sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah direncanakan dengan adanya pandemi Covid-19.

Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P dalam laporannya kepada Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa beberapa kegiatan utama harus menyesuaikan dengan kondisi, seperti pelaksanaan kegiatan outbond diganti dengan kegiatan assesment and leadership, dan kegiatan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) diganti menjadi kegiatan Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN). Keadaan pandemi juga berdampak pada kegiatan proses belajar mengajar yang seharusnya tatap muka, dilaksanakan melalui virtual. "Meskipun demikian proses belajar mengajar tetap berjalan dan dapat memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan," kata Sugeng.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan

apresiasi dan rasa bangganya kepada para Alumni PPRA 62 yang telah menunjukkan dedikasi, kesabaran, kesungguhan, ketekunan, kekompakan, dan komitmennya selama pendidikan berlangsung hingga berakhirnya rangkaian pendidikan.

Lebih lanjut, Agus Widjojo mengatakan dengan bekal pengetahuan yang telah diberikan selama tujuh bulan, Lemhannas RI menaruh harapan besar kepada seluruh Alumni PPRA 62 untuk mampu mengimplementasikan seluruh ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang diperoleh selama pendidikan

**”
Lemhannas RI menaruh harapan besar kepada seluruh Alumni PPRA 62 untuk mampu mengimplementasikan seluruh ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang diperoleh selama pendidikan**

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

melalui pemahaman dan cara berpikir komprehensif, integral, holistik, dan sistemik. "Bekal ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan sesuai dengan penugasan di lingkungan kerja masing-masing," ujarnya.

Kemudian Agus Widjojo mengingatkan bahwa para alumni kini telah berada pada awal pengabdian kembali. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kompetensi tidak hadir untuk tujuan pada dirinya sendiri. Semua elemen tersebut hadir guna diabdikan sebagai instrumen pengabdian para peserta didik yang kini telah menjadi alumni.

"Menjadi penting bagi alumni untuk mengambil intisari dari seluruh materi yang diterima dan mencari bentuk operasionalnya sebagai jembatan yang menghubungkan antara pembekalan dalam pendidikan dengan pengabdian di lapangan," ujar Agus.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga memberikan selamat kepada Laksma TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M. atas Predikat Akademik Terbaik dan Kolonel Inf Ujang Darwis, M.D.A. atas Predikat Taskap Terbaik dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Lemhannas RI Tahun 2021.

RTD “Optimalisasi Peran Media Sosial Guna Mengembangkan Wawasan Kebangsaan”



Lemhannas RI mengadakan *Round Table Discussion* (RTD) tentang “Optimalisasi Peran Media Sosial Guna Mengembangkan Wawasan Kebangsaan” pada Rabu (1/9) secara hybrid (daring dan luring). RTD tersebut merupakan kelanjutan dari serangkaian diskusi, yakni dua *Focus Group Discussion* (FGD) di Lemhannas RI serta FGD di Lokus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Media sosial telah mengubah dunia. Karakteristik media sosial yang cepat dan memiliki jangkauan luas sangat mempengaruhi kemampuan kita berkomunikasi, membangun hubungan, mengakses, dan menyebarkan informasi, bahkan untuk sampai pada keputusan terbaik,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Media sosial memberikan kemungkinan yang hampir tidak terbatas dalam berkomunikasi dan mengakses informasi.

Perkembangan wawasan kebangsaan diharapkan semakin pesat ketika dapat memanfaatkan segala sarana dan sumber daya yang ada, termasuk media sosial yang saat ini sedang digemari masyarakat. Agus Widjojo menyampaikan bahwa nilai-nilai wawasan kebangsaan

dapat diinformasikan secara luas kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mengantisipasi nilai-nilai yang merugikan bangsa dan mengadopsi sikap mental yang mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, menurutnya kondisi saat ini media sosial belum banyak digunakan untuk menyosialisasikan materi wawasan kebangsaan.

“Media sosial memiliki peran strategis untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai persoalan, oleh karena itu penggunaan media sosial untuk menyosialisasikan pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan perlu diusahakan agar lebih optimal,” kata Agus.

Pada kesempatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. bahwa salah satu ancaman yang dihadapi saat ini adalah *cyber war*, penyalahgunaan narkoba, penggiringan pada perilaku intoleransi, terorisme, radikalisme, dan potensi terjadi praktek separatisme. Pemerintah juga harus memblokir narasi-narasi negatif terutama yang mengancam persatuan

kesatuan dan ideologi bangsa Indonesia.

Untuk menghadapi potensi negatif yang bersumber dari media sosial, misalnya hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, dan pornografi, pemerintah telah mendorong secara luas adanya gerakan literasi edukasi dan keadaban publik dalam bermedia sosial. “Penting diketahui oleh masyarakat adalah bahwa perilaku di media sosial dan dunia maya akan tersimpan selamanya sebagai jejak-jejak digital mereka,” tutur Muhadjir.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi potensi negatif media sosial adalah dengan menanamkan nilai karakter dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Bila tidak dibekali dengan karakter Pancasila dan wawasan kebangsaan, generasi penerus bangsa akan termakan oleh ancaman tersembunyi di media sosial atau dunia maya. Akibatnya persatuan dan kesatuan Indonesia menjadi terancam. “Melalui wawasan kebangsaan, setiap generasi penerus dibentuk agar bersikap sebagai bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ungkap Muhadjir.



Kamis, 2 September 2021

RDP Lemhannas RI dengan Komisi I DPR RI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, didampingi jajarannya menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas Laporan Keuangan Lemhannas RI T.A. 2020, RKA Lemhannas RI T.A. 2022, dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Lemhannas RI T.A. 2022, pada Kamis (2/9) di Komplek DPR RI.

Dalam RDP tersebut, Agus Widjojo menyampaikan bahwa Lemhannas RI telah melakukan *Refocusing* Anggaran T.A. 2020 dan dari pagu akhir Lemhannas RI tersebut, realisasi anggaran Lemhannas RI T.A 2020 sebesar 93,05%. Sisa anggaran Lemhannas RI T.A. 2020 yang tidak terserap adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang terdiri dari belanja pegawai untuk tunjangan kinerja dan gaji ke-13 karena adanya kebijakan pemerintah serta biaya perjalanan dinas luar negeri dan biaya langganan daya operasional akibat pandemi Covid-19, program pengawasan internal akibat efektifitas penggunaan anggaran pada pelaksanaan kegiatan, dan program pengembangan ketahanan nasional karena beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan akibat pandemi Covid-19.

Agus Widjojo juga memaparkan penyelenggaraan program dan anggaran pengembangan ketahanan nasional Lemhannas RI pada tahun 2020 di tiga ke deputian yaitu Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Kedeputian Pengkajian Strategik. Ia juga menyampaikan bahwa laporan keuangan Lemhannas RI per 31 Desember 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. "Laporan keuangan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Sehingga sudah enam tahun berturut-turut Lemhannas RI memperoleh predikat WTP," ucapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Agus Widjojo mengatakan pula bahwa Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lemhannas RI oleh Kemenpan RB mendapatkan penilaian "B" (Baik). Sedangkan penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran oleh Kementerian Keuangan tahun memperoleh nilai 96,49 dengan kategori Sangat Baik.

Mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Lemhannas RI T.A. 2022. Rencana Kerja Lemhannas RI T.A. 2022, Agus Widjojo menyampaikan hal tersebut telah tertuang dalam dua program, yaitu program pembinaan ketahanan nasional dan program dukungan manajemen. Program pembinaan ketahanan nasional disusun pada program tiga ke deputian dan satu pusat laboratorium. Kedeputian bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional akan melaksanakan PPRA sebanyak dua angkatan, yaitu angkatan 63 dan 64 untuk 200 orang dan P3DA 11 untuk 50 orang.

Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si. menyampaikan apresiasi atas predikat WTP sebanyak enam kali berturut-turut yang diperoleh Lemhannas RI. "Saya kira ini menunjukkan transparansi keuangan dan pertanggungjawaban yang luar biasa," kata Zammil.

Selanjutnya Zammil juga mengapresiasi pendidikan Lemhannas RI karena melihat lulusan Lemhannas RI memiliki ciri khas dalam menganalisis. "Saya berharap bisa mencapai apa yang pernah diacanakan, *World Class Institution*," ujar Zammil.

Pertemuan Rutin **Perista Lemhannas RI**



Selasa, 7 September 2021

Lemhannas RI menyelenggarakan pertemuan rutin Anggota Persatuan Istri Anggota (Perista Lemhannas RI) dan Karyawati Lemhannas RI pada Selasa (7/9) secara *hybrid* (daring dan luring) dengan mengangkat tema "Kesehatan Mental di Era Perubahan".

Dalam paparan dr. Santi Yuliani, Sp.KJ., M.Sc. selaku narasumber menyampaikan bahwa berbicara tentang mental ada tiga area yang dibicarakan, yakni *mood*, *cognitive*, dan *behavior*. *Mood* adalah suasana perasaan dan emosi, yang dimaksud emosi bukan hanya marah tapi suasana perasaan yang ada dalam diri. *Cognitive* adalah pola dan isi pikiran yang ada di dalam otak. *Behavior* adalah sikap dan perilaku.

dr. Santi menekankan bahwa seseorang tidak bisa dibidang sehat mentalnya apabila mengalami gangguan di salah satu lini. "Artinya orang bisa disebut sehat mentalnya apabila suasana perasaan dan emosinya baik, pola dan isi pikirannya juga baik, dan juga sikap dan perilakunya baik. Jadi mental mencakup tiga hal ini *mood*, *cognitive*, dan *behavior*," ucapnya.

dr. Santi juga menyampaikan bahwa perasaan sedih, cemas, gelisah, stress, dan takut bukanlah hal yang salah, perasaan tersebut adalah hal biasa dan hal wajar saat menghadapi suatu kondisi perubahan yang dirasakan. Namun, sedih, cemas, gelisah, stress, dan takut yang berkepanjangan akan menimbulkan akibat lain seperti terjadinya gangguan fisik seperti mata lebih melotot, bibir lebih kering, pernapasan lebih cepat, jantung berdebar-debar, otot menjadi tegang, pencernaan terganggu, dan sering berkeingatan.

Kondisi gangguan fisik tersebut bisa jadi merupakan respon otak terhadap ketakutan yang kemudian menjadi gangguan fisik sementara, tidak menetap disaat sudah bisa stress sudah bisa teratasi. Namun, jika stress tidak teratasi dengan baik maka bisa menjadi penyakit terus menerus. dr. Santi menegaskan bahwa saat mental terganggu dan tidak bisa teratasi, kondisi fisik sangat bisa terganggu. "Saat mental kita terganggu, tidak mungkin fisik kita tidak terganggu," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, dr. Santi memberikan beberapa cara untuk menenangkan diri. Pertama, disarankan

untuk mengambil posisi duduk saat mengetahui berita yang menakutkan, yang membuat tidak nyaman, dan panik. Karena dengan mengubah dari posisi berdiri ke duduk akan memberikan kesempatan otak depan bagian logika untuk mengambil alih keributan amygdala. Kemudian diikuti mengatur nafas agar lebih perlahan-lahan, karena otak kita membutuhkan oksigen untuk bisa berpikir lebih baik.

Kedua, disarankan membuat ceklis dengan membuat catatan tentang apa saja yang bisa dilakukan, siapa saja yang bisa membantu kondisi, dan bagaimana alur yang harus ditempuh. Ketiga, berpikir tentang saat ini, jangan berpikir terlalu jauh daripada yang seharusnya dipikirkan. Harus diingat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memastikan yang terjadi selanjutnya, tapi yang bisa dilakukan adalah mengendalikan apa yang terjadi saat ini.

Dan yang keempat, membaca referensi secara adil, jangan hanya membaca referensi yang negatif tapi juga membaca referensi yang positif dan tidak disarankan untuk mengikuti berita-berita yang sumbernya tidak jelas.

Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Penanggung Jawab: **Agus Arif Fadila** Redaktur: **Alton Endarwanto Hadi Susanto** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**
Pembuat Artikel: **Naomi Augustina** Penerjemah: **Magista Dian Fitriilia** Desain Grafis: **Arini Maulidia** Fotografer: **Suryadi**
Sekretariat: **Irmira Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini, Gatot, Yatik Wulandari, Yusnadi**
Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110
Telp. (021) 3832108, 3832109 Fax. (021) 3451926 Website <https://www.lemhannas.go.id>

